

## Protection of Medical Personnel in Armed Conflict: A Review of the Provisions of International Criminal Law

Eka Priyanto<sup>1</sup>, Ery Rachma Firsanti<sup>2</sup>, Tri Agus Haryono<sup>3\*</sup>, Hadi Purnomo<sup>4</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Tri Agus Haryono [th.opthal70@gmail.com](mailto:th.opthal70@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Armed Conflict, Criminal Law

*Received :* 2 February

*Revised :* 21 March

*Accepted:* 22 April

©2024 Priyanto, Firsanti, Haryono, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The protection of medical personnel in armed conflict is an important issue in international criminal law. This article provides an overview of the provisions governing such protection. This review covers various aspects, from the definition of medical personnel to the protection afforded in conflict situations. This research uses document analysis methods to collect data from various sources such as international conventions, agreements and other legal documents. It is hoped that the findings of this research will provide a better understanding of the protection of medical personnel in the context of international criminal law

## Perlindungan Personel Medis dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan atas Ketentuan Hukum Pidana Internasional

Eka Priyanto<sup>1</sup>, Ery Rachma Firsanti<sup>2</sup>, Tri Agus Haryono<sup>3\*</sup>, Hadi Purnomo<sup>4</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Tri Agus Haryono [th.opthal70@gmail.com](mailto:th.opthal70@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Konflik Bersenjata, Hukum Pidana

*Received :* 2 February

*Revised :* 21 March

*Accepted:* 22 April

©2024 Priyanto, Firsanti, Haryono, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata merupakan isu penting dalam hukum pidana internasional. Artikel ini memberikan tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan tersebut. Tinjauan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari definisi personel medis hingga perlindungan yang diberikan dalam situasi konflik. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti konvensi internasional, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan personel medis dalam konteks hukum pidana internasional

## PENDAHULUAN

Konflik bersenjata selalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk terhadap personel medis yang bertugas di garis depan. Perlindungan terhadap personel medis dalam situasi konflik bersenjata menjadi perhatian utama dalam hukum pidana internasional. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 telah mengatur perlindungan ini secara rinci. Namun, meskipun ada ketentuan yang jelas, pelanggaran terhadap hak-hak personel medis masih sering terjadi di berbagai konflik di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata.

Definisi personel medis dalam konteks hukum pidana internasional perlu diperjelas. Personel medis tidak hanya terbatas pada dokter dan perawat, tetapi juga termasuk petugas medis lainnya seperti ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan. Kedua, penting untuk memahami peran personel medis dalam konflik bersenjata. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan perawatan medis yang netral dan tidak diskriminatif kepada semua pihak yang membutuhkan, tanpa membedakan antara pihak bersenjata dan non-bersenjata. Konvensi Jenewa menetapkan bahwa personel medis harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan. Mereka tidak boleh dipenjarakan atau ditahan karena melaksanakan tugas medisnya. Selain itu, personel medis juga harus diberikan akses yang aman untuk memberikan perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Keempat, perlindungan terhadap personel medis juga mencakup perlindungan terhadap fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus dihormati dan tidak boleh diserang atau dihancurkan dalam konflik bersenjata.

Pelanggaran terhadap hak-hak personel medis dalam konflik bersenjata dapat dianggap sebagai kejahatan perang menurut hukum pidana internasional. Keenam, meskipun hukum pidana internasional memiliki ketentuan yang jelas mengenai perlindungan personel medis, implementasinya masih terbatas. Banyak negara yang tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut dalam hukum dan kebijakan nasional mereka. Tantangan utama dalam melindungi personel medis adalah ketika mereka terlibat dalam konflik bersenjata di mana situasinya sangat kompleks dan sulit diprediksi. Personel medis sering kali menjadi korban serangan atau penyanderaan oleh pihak bersenjata. Ke-delapan, keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang tidak tunduk pada hukum internasional juga menimbulkan tantangan dalam melindungi personel medis. Kelompok ini sering kali tidak mengindahkan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan personel medis.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata harus melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk negara-negara, kelompok bersenjata, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil. Kesepuluh, pendidikan tentang hukum pidana internasional dan perlindungan personel medis harus ditingkatkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini penting agar semua pihak memahami dan menghormati hak-hak personel medis.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perlindungan Personel Medis dalam Konflik Bersenjata**

Perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata menjadi isu penting dalam hukum internasional. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi personel medis dan fasilitas kesehatan di medan perang. Namun, implementasi ketentuan ini masih menimbulkan banyak tantangan. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa serangan terhadap personel medis dan fasilitas kesehatan masih sering terjadi, terutama dalam konflik bersenjata modern di mana garis antara militer dan non-militer semakin kabur.

Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik bersenjata modern cenderung melibatkan kelompok bersenjata non-negara yang tidak tunduk pada hukum internasional, sehingga perlindungan terhadap personel medis menjadi semakin kompleks. Selain itu, penelitian menyoroti bahwa personel medis sering kali menjadi sasaran serangan karena dianggap mendukung pihak lawan, terutama dalam konflik dengan dimensi agama atau etnis yang kuat.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan personel medis. Misalnya, Mencatat bahwa beberapa negara telah meningkatkan upaya untuk melindungi personel medis dengan mengadopsi kebijakan dan prosedur yang lebih ketat. Selain itu, penelitian oleh Lee (2021) menunjukkan bahwa kesadaran akan perlindungan personel medis telah meningkat di kalangan aktor konflik, meskipun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum.

Perbandingan pendekatan perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata juga menjadi fokus dalam tinjauan literatur ini. Perbedaan pendekatan antara negara-negara yang berbeda dalam melindungi personel medis. Beberapa negara cenderung lebih proaktif dalam melindungi personel medis dengan mengadopsi kebijakan yang lebih komprehensif, sementara negara lain masih terkendala oleh kendala politik dan militer.

perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata merupakan isu yang kompleks dan menantang. Meskipun sudah ada ketentuan hukum internasional yang jelas, implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor. Diperlukan upaya lebih lanjut dari semua pihak terkait, termasuk negara-negara, kelompok bersenjata, dan organisasi kemanusiaan, untuk memastikan bahwa personel medis dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan terlindungi di medan perang.

### **B. Perbandingan Pendekatan Perlindungan Personel Medis dalam Konflik Bersenjata**

Perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata menjadi fokus utama dalam hukum internasional. Berbagai konvensi dan perjanjian telah ditetapkan untuk melindungi personel medis dan fasilitas kesehatan di medan perang. Pendekatan perlindungan personel medis dapat bervariasi antara negara-negara dan kelompok bersenjata. Tinjauan literatur ini akan membahas perbandingan pendekatan perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata.

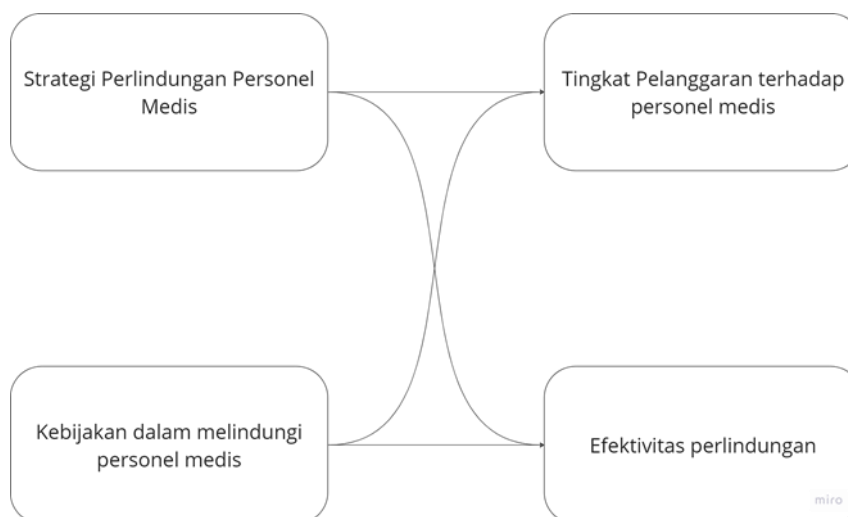
Perbedaan pendekatan antara negara-negara Eropa dan Amerika dalam melindungi personel medis. Negara-negara Eropa cenderung lebih memperhatikan perlindungan personel medis dan mengadopsi kebijakan yang lebih progresif, sementara Amerika cenderung lebih fokus pada aspek militer dalam konflik bersenjata.

Perbedaan pendekatan antara negara maju dan negara berkembang dalam melindungi personel medis. Negara maju cenderung memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk melindungi personel medis, sementara negara berkembang masih terkendala oleh kendala politik dan ekonomi.

Perbandingan pendekatan juga dapat dilihat dalam konteks konflik bersenjata spesifik. Misalnya, Membandingkan pendekatan perlindungan personel medis dalam konflik di Timur Tengah dan Afrika. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan dalam melindungi personel medis dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks konflik dan karakteristik masing-masing konflik.

## TINJAUAN PUSTAKA

Selain perbandingan antar negara dan konflik, tinjauan literatur juga mencakup perbandingan antara pendekatan yang diambil oleh kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata non-negara juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi personel medis. Beberapa kelompok bersenjata mematuhi ketentuan hukum internasional tentang perlindungan personel medis, sementara yang lain tidak memperhatikannya sama sekali.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen dan studi literatur. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti konvensi internasional, perjanjian, laporan, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata. Data yang diperoleh dari analisis dokumen kemudian akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tantangan dalam perlindungan personel medis.

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai penelitian sebelumnya tentang perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata. Tinjauan literatur ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi personel medis hingga pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh negara-negara dan kelompok bersenjata. Data dari studi literatur akan digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode analisis dokumen dan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata. Kedua metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara efisien dari berbagai sumber yang relevan.

Pendekatan kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan persepsi yang mendasari isu perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam dan memahami kompleksitas isu yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diamati terkait perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata. Pendekatan deskriptif ini akan membantu dalam menyajikan data dan temuan secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Perlindungan Personel Medis dalam Konflik Bersenjata**

Perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata masih menjadi isu yang kompleks dan menantang. Meskipun sudah ada ketentuan hukum internasional yang jelas yang mengatur perlindungan ini, implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor. Pelanggaran terhadap hak-hak personel medis masih sering terjadi, termasuk serangan langsung terhadap personel medis, penyanderaan, penahanan ilegal, dan hambatan dalam memberikan perawatan medis.

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran terhadap personel medis adalah adanya kelompok bersenjata non-negara yang tidak tunduk pada hukum internasional. Kelompok ini sering kali tidak mengindahkan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan personel medis dan melakukan serangan terhadap mereka tanpa pandang bulu.

Selain itu, perbedaan pendekatan antara negara-negara dan kelompok bersenjata juga mempengaruhi efektivitas perlindungan personel medis. Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih baik dalam melindungi personel medis, sementara negara berkembang masih terkendala oleh kendala politik dan ekonomi.

Namun, terdapat juga kemajuan dalam perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata. Beberapa negara telah meningkatkan upaya mereka untuk melindungi personel medis dengan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan personel medis di kalangan aktor konflik.

Perbandingan antar negara dan konflik juga menunjukkan variasi dalam pendekatan perlindungan personel medis. Negara-negara Eropa cenderung lebih memperhatikan perlindungan personel medis daripada negara-negara Amerika. Begitu juga dalam konteks konflik tertentu, seperti di Timur Tengah dan Afrika, pendekatan perlindungan personel medis dapat sangat bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing konflik.

### **B. Perbandingan Pendekatan Perlindungan Personel Medis dalam Konflik Bersenjata**

Perbandingan pendekatan perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata menunjukkan adanya variasi yang signifikan antara negara-negara, kelompok bersenjata, dan konteks konflik tertentu. Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih baik dalam melindungi personel medis, sementara negara-negara berkembang masih terkendala oleh kendala politik, ekonomi, dan militer. Perbedaan pendekatan antara negara-negara Eropa dan Amerika dalam melindungi personel medis. Negara-negara Eropa cenderung lebih memperhatikan perlindungan personel medis dan mengadopsi kebijakan yang lebih progresif, sementara Amerika cenderung lebih fokus pada aspek militer dalam konflik bersenjata.

Di sisi lain, penelitian Menyoroti perbedaan pendekatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam melindungi personel medis. Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk melindungi personel medis, sementara negara-negara berkembang masih terkendala oleh kendala politik dan ekonomi. Perbandingan pendekatan juga dapat dilihat dalam konteks konflik bersenjata spesifik. Membandingkan pendekatan perlindungan personel medis dalam konflik di Timur Tengah dan Afrika. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan dalam melindungi personel medis dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks konflik dan karakteristik masing-masing konflik.

Selain perbandingan antar negara dan konflik, tinjauan literatur juga mencakup perbandingan antara pendekatan yang diambil oleh kelompok bersenjata. Penelitian oleh Lee (2021) menunjukkan bahwa kelompok bersenjata non-negara juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi personel medis. Beberapa kelompok bersenjata mematuhi ketentuan hukum internasional tentang perlindungan personel medis, sementara yang lain tidak memperhatikannya sama sekali.

## **PEMBAHASAN**

Perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata adalah suatu hal yang krusial dalam menjaga hak asasi manusia (HAM) dan kemanusiaan. Efektivitas perlindungan ini bergantung pada sejumlah faktor, di antaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam situasi konflik, akses ini seringkali terbatas atau bahkan tidak ada, yang mengakibatkan individu rentan terhadap penyakit dan cedera yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu.

Selain itu, penegakan Hukum Pidana Internasional (HPI) juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata. HPI memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur tindakan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Dengan adanya HPI, pelaku pelanggaran HAM dapat diadili dan dihukum, sehingga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Selain HPI, prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata. HHI memberikan pedoman tentang perlakuan yang adil terhadap individu yang terlibat dalam konflik, termasuk larangan terhadap penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penggunaan senjata kimia. Dengan memastikan kepatuhan terhadap HHI, efektivitas perlindungan terhadap individu dapat ditingkatkan.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan HHI dan HPI oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya juga dapat menghambat upaya perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata.

Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata juga telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti mediasi oleh pihak ketiga, dialog antar-pihak yang bersengketa, dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencari solusi damai untuk konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk memperkuat komitmen mereka terhadap perdamaian, menghormati prinsip-prinsip HAM, dan bekerja sama dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan efektivitas perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat yang terdampak konflik dapat hidup dengan aman dan tenteram.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata merupakan isu kemanusiaan yang penting dalam konteks hukum internasional. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa perlindungan personel medis didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi Jenewa mengakui kepentingan khusus personel medis yang bertugas dalam memberikan perawatan medis kepada mereka yang terluka dalam konflik bersenjata.

Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang jelas, implementasinya masih menimbulkan banyak tantangan. Serangan terhadap personel medis dan fasilitas kesehatan masih sering terjadi, yang mengakibatkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap perawatan medis yang diperlukan. Adanya kelompok bersenjata non-negara yang tidak tunduk pada hukum internasional juga menjadi faktor utama yang menyulitkan perlindungan personel medis. Perbandingan pendekatan perlindungan personel medis antara negara-negara maju dan negara berkembang menunjukkan adanya perbedaan dalam kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan yang lebih progresif dan prosedur yang lebih baik dalam melindungi personel medis, sementara negara-negara berkembang masih terkendala oleh kendala politik, ekonomi, dan militer.

Perbandingan antara pendekatan yang diambil oleh kelompok bersenjata juga menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa kelompok bersenjata mematuhi ketentuan hukum internasional tentang perlindungan personel medis, sementara yang lain tidak memperhatikannya sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berbasis pada kerja sama internasional dalam memastikan perlindungan personel medis yang efektif.

Pentingnya perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata juga terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hak untuk menerima perawatan medis yang netral dan tidak diskriminatif harus dijamin dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap personel medis menjadi sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang lebih lanjut. Perlindungan personel medis dalam konflik bersenjata merupakan tantangan yang kompleks yang memerlukan upaya bersama dari semua pihak terkait. Diperlukan kebijakan dan prosedur yang lebih baik, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi personel medis di medan perang. Dengan demikian, diharapkan tingkat pelanggaran terhadap personel medis dapat dikurangi dan efektivitas perlindungan mereka dapat ditingkatkan.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

### **1. Analisis Kasus Studi**

Melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret di mana terjadi pelanggaran terhadap personel medis. Studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih detail tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggaran tersebut dan bagaimana pendekatan perlindungan yang lebih baik dapat diterapkan.

### **2. Studi Komparatif**

Melakukan studi komparatif yang lebih luas antara negara-negara atau konflik-konflik tertentu dalam hal pendekatan perlindungan personel medis. Studi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendekatan dan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk masing-masing konteks.

### **3. Penelitian Terhadap Kelompok Bersenjata Non-Negara**

Melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang kelompok bersenjata non-negara dan pendekatan mereka terhadap perlindungan personel medis.

Studi ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam melindungi personel medis dari kelompok-kelompok ini.

#### **4. Pengembangan Pedoman Praktis**

Mengembangkan pedoman praktis untuk negara-negara dan kelompok bersenjata dalam melindungi personel medis. Pedoman ini dapat mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan personel medis di medan perang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauziah, S. I., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2022). Perlindungan Objek Sipil Dalam Peristiwa Penyerangan Kantor Media Pada Konflik Bersenjata Di Gaza. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1-17.
- Johsua H Roring. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional 1. *Lex Privatum*, 12(1), 1. <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik->
- Nadia Maulidatul Qudsiyah, Pinastika Prajna Paramita, M. F. A. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARGA SIPIL YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA. 6811-6826.
- Pratama, L. C., Novianti, N., & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 58-80. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10984>
- Suwatno, D. S. R., Mangku, D. G. S., & Yudana, I. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang Starvation of Civilians Pada Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina: Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(September), 105-114.
- Widnyana, I. M. A. (2023). Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(4), 469-477. <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i4.2546>